

## **Evaluasi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.234/U/2000 Tentang Pendirian Perguruan Tinggi**

(Studi Evaluasi Kepmendiknas No.234/U/2000 di Kopertis Wilayah VII Jawa Timur)

Oleh :

**Yayuk Suci Rahayu**

Kopertis Wilayah VII  
Jawa Timur

Yayuk\_suci\_rahayu@yahoo.com

### ***Abstract***

The aims of the research are to evaluate and identify factors causing efficacy / failure of policy of Kepmendiknas No. 234/U/2000 about Guidance of Founding of College in its bearing with College Private sector growth in Regional Kopertis of VII East Java, and also to give recommendation proposal able to be used as by trouble-shooting alternative faced. As for method which is utilized in this research is deskriptip method qualitative. Research Obyek is College Private sector in Regional Kopertis environment of VII East Java, mostly stand up before publishing of Kepmendiknas No. 234/U/2000. Result of research indicate that the target of evaluation policy of this Kepmendiknas, namely make harmonization of physical science area and social science still not yet succeeded, other target namely quicken PTS independence from energy side also still not yet succeeded, is proven from situation of lecturer remain to amounting to 18.993 one holding who have lectureship academic position only 3.612 people ( 19,02%). While seen from titled education qualification of Magister only 4.355 people ( 22,93%), and only equal to 594 people ( 3,13%) which is have education to of Doctor ( S3). Comparison between physical science area group and social science area in the reality still less adequate. PTS motivation beside have social mission also have business mission / commercial, so that in decision making or consideration having the character of upper most economic progressively. Fund provided by College Private sector in general stem from student, this matter disagree with section 11 Kepmendiknas No. 234/U/2000, that source of defrayal of college provided by pertinent college organizer. The Head perception of the PTS which in form of University source of defrayal coming from student most coming from social science area group student.

**Keyword :** *Evaluation, Kepmendiknas No. 234/U/2000, Growth College Private sector*

### **PENDAHULUAN**

Di Indonesia, pada tahun 1999 lulusan perguruan tinggi bidang Ilmu Pertanian 2,91%, MIPA 0,9%, Teknologi 4,8%, Kesehatan/Kedokteran 1,4% dan Ilmu Sosial dan Kemanusiaan 90%. Pada tahun 2001, jumlah mahasiswa yang terdaftar di PTN menurut

bidang Ilmu Pertanian 6%, MIPA 3%, Teknik 7%, Kedokteran 3% dan IPSK 81%. Disisi lain hasil lulusan perguruan tinggi tahun 2006 menunjukkan penyebaran bidang ilmunya adalah sebagai berikut : khususnya di Perguruan Tinggi Swasta (PTS) adalah Pertanian 7%,

MIPA 2%, Teknik 21%, Kesehatan/Kedokteran 2%, dan IPSK 68%.

Dalam mewujudkan komposisi pendidikan di Indonesia serta untuk pengawasan, pengendalian dan pembinaan pada perguruan tinggi upaya pemerintah antara lain mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 234/U/2000, tanggal 20 Desember 2000, tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi. Diterbitkannya Kepmendiknas tersebut adalah sebagai pedoman untuk pendirian perguruan tinggi baru dan penambahan / pembukaan program studi baru, karena rendahnya daya serap oleh dunia kerja untuk bidang ilmu sosial (IPS) dan dibutuhkan pada saat ini untuk bidang ilmu eksakta (IPA), serta ketimpangan komposisi bidang ilmu eksakta dan non eksakta.

Komposisi per bidang ilmu masih belum sesuai dengan perencanaan kebijakan Departemen Pendidikan Nasional, yang pada akhir PJP II diharapkan komposisi kelompok bidang ilmu berada pada kondisi : Eksakta dan Teknologi (IPA) = 45%, Sosial (IPS) = 30%, Kesehatan = 25%. Sedangkan kondisi komposisi bidang ilmu yang ada di Kopertis Wilayah VII saat ini adalah sebagai berikut: (a) Bidang Ilmu Eksakta dan Teknologi (IPA) sebanyak 499 program studi atau sebesar 32,00% atau minus 13,00% dari kondisi yang diinginkan, (b) Bidang ilmu Sosial (IPS) sebanyak 843 program studi atau sebesar 54,07% atau terjadi surplus sebesar 24,07% dari kondisi yang diinginkan, dan (c) Bidang Kesehatan sebanyak 217 program studi atau sebesar 13,93% atau terjadi minus sebesar 11,07% dari kondisi yang diinginkan.

Dengan keadaan seperti di atas maka, Kopertis Wilayah VII Jatim dalam pelaksanaan proses evaluasi harus memperhatikan pengembangan serta keseimbangan ilmu dengan mengutamakan pengembangan kelompok ilmu eksakta (IPA) dan wawasan terhadap kebutuhan kerja serta memperhatikan peta pendidikan di suatu wilayah yang menggambarkan jumlah dan bentuk PTS yang sudah ada, jenis unit yang diselenggarakan, persebaran PTS dan daya dukung pertumbuhan serta menghindari bidang ilmu sosial (IPS) yang dianggap telah mencukupi kebutuhan

antara lain : Kependidikan, Hukum, Sosial dan Politik, serta memprioritaskan pengembangan bidang ilmu eksakta dan teknologi (IPA).

Adapun rumusan permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah Evaluasi Kepmendiknas No.234/U/2000 tentang Pendirian Perguruan Tinggi dalam kaitannya dengan perkembangan Perguruan Tinggi Swasta di Kopertis Wilayah VII Jawa Timur, khususnya yang berbentuk Universitas? serta Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan keberhasilan/kegagalan dari Kepmendiknas tersebut?

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menyebabkan keberhasilan/kegagalan Kepmendiknas No.234/U/2000 tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif karena permasalahan belum jelas, holistik, kompleks, dinamis dan dimaksudkan untuk memahami secara mendalam situasi sosial. Adapun metode pengumpulan data menggunakan interview / wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dan gabungan ketiganya atau triangulasi.

Penelitian dilakukan di Kopertis Wilayah VII Jatim, jalan Dr. Ir. H. Soekarno No. 177 Surabaya dan Perguruan Tinggi Swasta yang berada di lingkungan dan di bawah pembinaan Kopertis Wilayah VII Jatim serta kedudukannya tersebar di seluruh wilayah Propinsi Jawa Timur.

Pengambilan sampel menggunakan Teknik *Purposive Sampling*, yakni penarikan sample dilakukan dengan sengaja. Responden dari Pimpinan PTS diperoleh sesuai jumlah PTS yang secara sengaja dipilih sebagai sampel penelitian. Responden PTS diambil dari 45 PTS dengan alasan bahwa Kepmendiknas No. 234/U/2000 belum dilaksanakan sepenuhnya di PTS tersebut, khususnya pemenuhan program studi bidang IPA.

Penelitian menggunakan teknik analisis data kualitatif. Dalam analisisnya data yang ditemukan dan dikumpulkan akan digambarkan, diuraikan serta diinterpretasikan dengan menggunakan uraian kata-kata atau kalimat

yang secara mudah dan dipahami (Sanapiah Faisal, 1981). Adapun data yang berupa angka-angka yang menunjuk pada seberapa besar dari sesuatu tersebut dianalisis melalui metode prosentase.

## ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan kebijakan Kepmendiknas No. 234/U/2000 tentang pedoman pendirian perguruan tinggi terhadap perkembangan PTS di Kopertis Wilayah VII Jatim. Selain itu juga dimaksudkan untuk mengamati dan mengevaluasi perguruan tinggi yang sudah ada pada saat mulai berlakunya keputusan tersebut sampai saat ini apakah sudah menyesuaikan dengan persyaratan pendirian perguruan tinggi tersebut atau belum. Sampai sejauh mana PTS di Lingkungan Kopertis Wilayah VII melaksanakan ketentuan yang ada di Kepmendiknas tersebut.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, tanggapan responden/Pimpinan PTS, menunjukkan bahwa semua responden setuju untuk memenuhi persyaratan seperti yang diinginkan oleh Kepmendiknas tersebut, disamping itu juga berminat untuk menambah jumlah komposisi program studi yang tidak sesuai dengan Kepmendiknas Nomor 234/U/2000. Akan tetapi sikap Pimpinan PTS dan sumber daya yang ada di PTS Kopertis Wilayah VII tersebut ternyata belum mendukung pelaksanaan Kepmendiknas No. 234/U/2000. Dampak dari kebijakan Kepmendiknas tersebut dalam 11 tahun sejak diberlakukan keputusan tersebut, ternyata secara kuantitatif hasilnya masih rendah.

Pelaksanaan Kepmendiknas Nomor 234/U/2000 secara benar bertujuan: (a) membuat penyesuaian/keseimbangan bidang ilmu eksakta dan bidang ilmu sosial, (b) Mendorong pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara lengkap dan merata sesuai tugas pokok, (c) Untuk meningkatkan kemandirian PTS terutama dari segi ketenagaan. Mengenai pelaksanaan Kepmendiknas tersebut terkait dengan perkembangan PTS di Kopertis Wilayah VII Jawa Timur dapat diuraikan sebagai berikut.

## 1. Kelembagaan Perguruan Tinggi di Kopertis VII Jawa Timur

Tabel 1. Perkembangan jumlah PTS di Kopertis Wilayah VII menurut bentuknya dari tahun 2005 – 2011

TAHUN	BENTUK PERGURUAN TINGGI					JUMLAH
	UNIV.	INST.	SEK.TING	AKADEMI	POLTEK	
2005	70	12	117	52	9	260
2006	71	12	130	56	9	278
2007	73	12	130	66	9	290
2008	74	12	139	79	12	316
2009	75	12	141	84	12	324
2010	75	12	141	85	12	325
2011	75	12	144	85	12	328

Sumber : Kopertis Wilayah VII, Januari 2012.

Tabel 1. menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 7 tahun (2005-2011), perkembangan jumlah Perguruan Tinggi Swasta di Kopertis Wilayah VII tumbuh sangat cepat dari tahun 2005 sebanyak 260 PTS menjadi 328 PTS pada tahun 2011 berarti terdapat peningkatan jumlah PTS sebanyak 68 PTS (26,15%) dengan rerata prosentase tiap tahunnya sebesar 3,74%. Peningkatan ini bila dilihat bentuk perguruan tinggi paling banyak terjadi yaitu pada bentuk Akademi meningkat sebanyak 33 PTS (63,46%), diikuti bentuk Sekolah Tinggi sebanyak 27 PTS (23,08%), universitas sebanyak 5 PTS (7,14%), dan poltek sebanyak 3 PTS (33,33%).

## 2. Status Akreditasi Perguruan Tinggi

Mengenai perkembangan status akreditasi PTS di Kopertis wilayah VII terkait data unit / program studi dapat dilihat pada table 2

Tabel 2. Data Unit / Program Studi PTS Kopertis Wilayah VII Tahun Akademik 2011/2012

No	Bentuk PTS	Jmlh PTS	JUMLAH UNIT / PROGRAM STUDI											
			AKREDITASI "A"			AKREDITASI "B"			AKREDITASI "C"			Jumlah		
			S-1	D-3	S-1	D-3	S-1	D-3	S-2	S-1	S-2	D-3	Jumlah	
1	Universitas	75	40	0	274	17	291	17	52	605	52	34	691	
2	Institut	12	0	0	32	3	37	1	3	69	3	4	76	
3	Sekolah Tinggi	144	5	1	65	13	113	20	12	183	12	34	229	
4	Akademi	85	0	1	0	9	0	24	0	0	0	34	34	
5	Poli Teknik	12	0	0	0	3	0	11	0	0	0	14	14	
JUMLAHPTS		328	45	2	371	45	441	73	67	857	64	120	1.044	
Jmlh Unit/status			47		416		514		67					
PROSENTASE			4,5 %		39,8 %		49,2 %		6,4 %					

Sumber : Data Sub bagian adm. akreditasi & publikasi kopertis wilayah VII, tahun 2011

Dari hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan yang cukup berarti baik dari segi jumlah unit program studi PTS maupun statusnya. Hal ini nampak seperti pada Tabel 2. bahwa dari 1.559 unit program studi PTS di Kopertis Wilayah VII pada tahun akademik 2011/2012 yang sudah terakreditasi dari BAN-PT sebanyak 1.044 unit program studi atau sebesar 66,97%, dengan rincian sebagai berikut : Terakreditasi "A" sebanyak 47 unit program studi (4,5%), terakreditasi "B" 416 unit program studi (39,8%) dan terakreditasi "C" 514 unit program studi (49,2%) sedang untuk jenjang S2 yang terakreditasi sebanyak 67 unit program studi (6,4%).

### 3. Perkembangan Program Studi PTS menurut Bidang Ilmu

Tabel 3. Jumlah Unit Program Studi menurut Bidang Ilmu Tahun 2005-2011

NO	BIDANG ILMU	TAHUN						
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Hukum	68	68	70	70	73	73	74
2	Sosial	144	144	144	146	146	145	150
3	Ekonomi	299	299	289	289	289	290	293
4	Seni	13	13	13	14	14	15	15
5	Sastra & Filsafat	32	33	35	37	39	40	43
6	Pendidikan	269	214	214	229	229	242	246
7	Psikologi	20	20	20	21	21	21	22
8	Teknologi	338	338	356	375	378	377	372
9	Pertanian	107	107	65	59	59	58	59
10	MIPA-Sains	60	60	63	64	64	63	68
11	Kesehatan	65	67	90	110	204	209	217
Jumlah		1415	1363	1359	1414	1516	1.533	1.559

Sumber : Sub Bagian Adm. Akreditasi & Publikasi Kopertis Wilayah VII (Data diolah)

Dari kelompok bidang ilmu eksakta secara umum lebih sedikit jumlah unitnya, yaitu sebanyak 716 unit program studi atau sebesar 45,93% dibanding dengan kelompok bidang ilmu sosial, yaitu sebanyak 843 unit program

studi atau sebesar 54,07% (Tabel 3.). Lambatnya perkembangan dari bidang ilmu eksakta ini pada umumnya terdapat kesulitan pada masalah pembiayaan operasional yang cukup tinggi (wawancara dengan pimpinan PTS), namun demikian jika diperhatikan pada bidang ilmu teknologi terlihat bahwa pada tahun 2005 sebanyak 338 unit dan pada tahun 2011 menjadi 372 unit, berarti ada peningkatan sebesar 34 unit atau sebesar 10,06% atau rata-rata per tahun 1,44%. Pada tahun 2006, ada penataan berupa pengurangan program studi pada jenjang D3 untuk bidang ilmu kependidikan, sehingga jumlahnya menjadi 214 program studi, namun pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 program studi ini berangsur-angsur mengalami kenaikan walaupun tidak banyak. Pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 adanya penurunan jumlah unit program studi ekonomi dan unit program studi pertanian, kondisi ini disebabkan karena adanya penutupan program studi yang tidak aktif karena tidak ada mahasiswanya

### 4. Jumlah Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi di Kopertis VII

Jumlah tenaga pengajar tetap PTS di Kopertis Wilayah VII setiap tahunnya menunjukkan kenaikan angka. Pada tahun 2005 jumlah tenaga pengajar sebanyak 14.180 orang; dan pada tahun 2011 sebesar 18.993 atau mengalami kenaikan sebesar 4.813 atau 33,94% Peningkatan jumlah dosen terlihat sangat menggembirakan tetapi kenaikan jumlah tersebut tidak diikuti dengan kenaikan jumlah jabatan akademik. Nisbah antara jumlah tenaga pengajar tetap dengan jumlah mahasiswa terdaftar sampai dengan sekarang masih diatas nisbah maksimal yang dipersyaratkan yaitu 1:20 untuk ilmu eksakta dan 1:30 untuk ilmu social. Berarti bertambahnya PTS dan mahasiswa tidak diikuti dengan jumlah tenaga pengajar yang memadai, dengan demikian sejak Kepmendiknas No. 234/U/2000, yaitu sejak Tahun 2000 sampai dengan sekarang nisbah jumlah tenaga pengajar masih belum bisa terpenuhi.

## 5. Kualifikasi Jabatan Tenaga Pengajar

Pada tahun 2008 jumlah dosen dengan jabatan akademik Lektor ke atas adalah sebanyak 1.946 orang atau 11,61% dari seluruh dosen yang ada. Tahun 2009 sebanyak 2.190 atau 12,57%, tahun 2010 sebanyak 2.415 atau 12,66% dan tahun 2011 sebanyak 3.612 atau 19,02%. (Tabel 4)

Jumlah ini masih sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah tenaga pengajar tetap keseluruhan yang ada di PTS.

Tabel 4. Perkembangan kualifikasi jabatan akademik dosen tetap PTS di lingkungan Kopertis Wilayah VII Jatim tahun 2008-2011

NO	JABATAN AKADEMIK	TAHUN			
		2008	2009	2010	2011
1	<u>Tenaga Pengajar</u>	12.818	12.811	13.900	12.629
2	<u>Assisten Ahli</u>	1.996	2.423	2.759	2.756
3	<u>Lektor</u>	1.361	1.602	1.698	2.177
4	<u>Lektor Kepala</u>	561	562	667	1.353
5	<u>Guru Besar</u>	24	26	50	82
Jumlah		16.760	17.424	19.074	18.993

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Kopertis Wilayah VII (data diolah)

Data yang ada memperlihatkan bahwa saat ini jumlah dosen dengan jabatan Lektor keatas hanya sebanyak 3.612 orang atau 19,02% dari seluruh jumlah dosen tetap yang ada yaitu 18.993. Jumlah inilah yang memiliki kewenangan penuh untuk membimbing dan menguji dan dapat dikategorikan mandiri sehingga dapat melaksanakan Tri Dharma secara mandiri pula.

Dari 18.993 Dosen yang ada 15.381 (80,98%) dosen hanya memiliki jabatan akademik setingkat asisten, yang artinya bahwa hampir seluruh dosen yang ada di PTS di lingkungan Kopertis Wilayah VII hanya memiliki kewenangan sebatas membantu dosen senior. Dengan demikian apabila mengacu pada ketentuan seperti tertuang dalam SK Menpan tersebut, maka dosen-dosen ini belum dapat melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

## 6. Kualifikasi Pendidikan Tenaga Pengajar

Tabel 5. Jumlah dosen tetap PTS di Kopertis Wilayah VII berdasarkan tingkat pendidikan

BENTUK PTS	KUALIFIKASI PENDIDIKAN				JUMLAH
	S3	S2	S1	LAIN-2	
UNIVERSITAS	503	2.838	7.849	-	11.190
INSTITUT	25	276	1.039	-	1.340
SEK. TINGGI	66	1.091	4.214	-	5.371
AKADEMI	-	105	715	10	830
POLITEKNIK	-	45	217	-	262
JUMLAH	594	4.355	14.034	10	18.993

Sumber: Data Kopertis Wilayah VII.

Dari Tabel 5 nampak bahwa jumlah tenaga pengajar yang berpendidikan S2 dan S3 jumlahnya sangat kecil kalau dibandingkan dengan jumlah tenaga pengajar keseluruhan, yaitu hanya 4.355 (22,93%) untuk S2 dan 594 (3,13%) untuk S3.

Sementara untuk tingkat pemenuhan oleh program studi khususnya untuk PTS yang berbentuk Universitas untuk tenaga pengajar dengan tingkat pendidikan S3 sudah memenuhi persyaratan minimal sesuai Undang-Undang No. 14/2005, yaitu dari 474 dosen yang dibutuhkan terpenuhi sejumlah 503 dosen (106,12%), sedang tingkat pendidikan S2 masih belum memenuhi persyaratan minimal, yaitu dari 5.100 dosen yang dibutuhkan terpenuhi sejumlah 2.838 dosen (55,65%). Untuk PTS yang berbentuk Institut tingkat pemenuhannya untuk tenaga pengajar dengan tingkat pendidikan S3 sebesar 69,44% dan S2 sebesar 46,46%, sedangkan PTS yang berbentuk sekolah tinggi S3 sebesar 78,57% dan S2 sebesar 49,41%. Untuk PTS yang berbentuk Akademi dan Politeknik cukup memperhatikan untuk memenuhi tenaga pengajar yang berlatar belakang pendidikan S2, masih belum bisa memenuhi sesuai ketentuan tersebut masing-masing hanya bisa memenuhi sebesar 16,99% dan 18,75%.

## 7. Pemenuhan Aspek Unsur Pelaksana Akademik Program Studi PTS Dengan Standart SK 234/U/2000

Tabel 6. Tingkat Pemenuhan Dosen Tetap Berdasarkan Tingkat Pendidikan PTS Kopertis Wilayah VII sesuai dengan UU Nomor 14/2005

BENTUK PTS	JUMLAH PROGRAM STUDI	DOSEN TETAP				PROSENTASE PEMENUHAN.	
		KEBUTUHAN		PEMENUHAN		S3	S2.
		S3	S2	S3	S2		
UNIVERSITAS	929	474	5.100	503	2.838	106,12%	55,65%
INSTITUT	105	36	594	25	276	69,44%	46,46%
SEK. TINGGI	382	84	2.208	66	1.091	78,57%	49,41%
AKADEMI	103	-	618	-	105	-	16,99%
POLITEKNIK	40	-	240	-	45	-	18,75%

Sumber : Sub Bagian Adm. Akreditasi & Publikasi Kopertis Wilayah VII (data diolah)

Bahwa pemenuhan standar minimal aspek unsur pelaksana akademik untuk bentuk universitas, belum sepenuhnya memenuhi persyaratan, dimana jumlah kelompok ilmu IPA dibawah standart minimal, kurang sebanyak 98 unit program studi (-13,07%), sedang untuk kelompok bidang ilmu IPS telah melebihi standart sebanyak 277 program studi atau kelebihan sebesar 36,93% (Tabel 6.)

## 8. Mahasiswa dan Produktivitas PTS

Perkembangan produktivitas lulusan ada kecenderungan yang menggembirakan karena setiap tahun ada kenaikan, pada tahun 2011 produktivitas lulusan sebesar 13,25 %, meskipun masih dibawah rata-rata PTN yang produktivitasnya telah mencapai, 15 %, tetapi sudah melebihi angka rata-rata PTS di Indonesia yang produktivitas lulusannya hanya sebesar 10,15% (Tabel 7.).

Tabel 7. Perkembangan Jumlah Mahasiswa. Jumlah Lulusan dan Tingkat Produktivitas PTS di Kopertis Wilayah VII Tahun 2005 - 2011

TAHUN	JUMLAH MAHASISWA			JUMLAH LULUSAN	PRODUK TIVITAS PER TAHUN
	MHS. CALON	MHS. BARU.	MHS.SELU RUHNYA.		
2005	101.195	90.569	358.525	35.227	9,83 %
2006	105.279	95.775	370.745	40.902	11,03 %
2007	124.725	109.620	417.851	47.554	11,38 %
2008	107.560	96.725	452.841	55.490	12,25 %
2009	118.875	97.895	515.637	63.125	12,24 %
2010	131.537	106.961	552.607	70.645	12,78 %
2011	140.175	114.910	562.871	74.560	13,25 %

Sumber: Data Kopertis Wilayah VII, diolah.

Pada Table 7. menunjukkan bahwa perkembangan produktivitas lulusan ada kecenderungan yang menggembirakan karena setiap tahun ada kenaikan, pada tahun 2011 produktivitas lulusan sebesar 13,25 %, meskipun masih dibawah rata-rata PTN yang produktivitasnya telah mencapai, 15 %, tetapi sudah melebihi angka rata-rata PTS di Indonesia yang produktivitas lulusannya hanya sebesar 10,15%.

## 9. Faktor Penyebab keberhasilan dan Kegagalan Implementasi Kebijakan

Ada tiga factor penyebab keberhasilan maupun kegagalan implementasi kebijakan Sk Mendinas No.234/U/2000, yakni : (a) factor sumberdaya, (b) factor sikap pelaksana, dan (c) factor motivasi.

(a). **Faktor Sumberdaya**, meliputi : (1) faktor tenaga pengajar tetap, yaitu dilihat dari jabatan akademik untuk Lektor ke atas hanya sebesar 3.612 (19,02%) dari seluruh dosen yang ada, bahkan keadaan yang sangat memprihatinkan yaitu sebanyak 15.381 (80,98%) dosen yang belum mempunyai jabatan akademik atau hanya berstatus tenaga pengajar. Dilihat dari tingkat pendidikan terutama yang bergelar Magister (S2) dan Doktor (S3) jumlahnya sangat kecil kalau dibandingkan dengan jumlah tenaga pengajar secara keseluruhan yaitu hanya sebesar 4.355 (22,93%) untuk S2 dan sebesar 594 (3,13%) untuk S3, dan (2) Faktor Dana. Dana yang disediakan oleh PTS umumnya bersumber dari mahasiswa, hal ini tidak sesuai dengan pasal 11 Kepmendiknas No. 234/U/2000, bahwa sumber pembiayaan utama harus disediakan oleh penyelenggara perguruan tinggi yang bersangkutan untuk menjamin kelancaran penye-

lenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan peranan, tugas, dan fungsi perguruan tinggi. Disamping itu dari persepsi Pimpinan PTS (yang berbentuk Universitas) sumber pembiayaan yang berasal dari mahasiswa sebagian besar berasal dari mahasiswa kelompok bidang ilmu sosial.

**(b). Faktor sikap pelaksana:** Pimpinan PTS kurang memberi respon yang positif dalam memahami tujuan dari kebijakan tentang pedoman pendirian perguruan tinggi, karena masih banyak pimpinan PTS yang tidak setuju terhadap penyesuaian jumlah lulusan dengan membatasi atau mengurangi bidang ilmu sosial. Berarti pelaksanaan kebijakan ini sulit dilaksanakan karena sikap pelaksana (Pimpinan PTS) yang tidak memberikan respon positif.

**(c). Faktor motivasi:** Pimpinan PTS dalam mendirikan perguruan tinggi disamping memiliki misi sosial juga mempunyai motivasi bisnis/komersial, sehingga dalam pengambilan keputusan atau penyusunan program, pertimbangan yang bersifat ekonomis semakin menonjol. Misalnya dalam pemenuhan keputusan ini, untuk menambah jumlah program studi yang diutamakan adalah yang diminati masyarakat khususnya bidang ilmu sosial, namun ada keengganan untuk membuka program studi eksakta yang membutuhkan biaya lebih mahal.

## SIMPULAN DAN SARAN

### SIMPULAN

Dari hasil analisis dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil evaluasi Kepmendiknas No. 234/U/2000 tentang Pendirian Perguruan Tinggi dalam kaitannya dengan perkembangan Perguruan Tinggi Swasta di Kopertis Wilayah VII Jawa Timur khususnya yang berbentuk Universitas menunjukkan bahwa: kebijakan Kepmendiknas belum berhasil, antara lain: (a) penyesuaian bidang ilmu eksakta dan ilmu sosial maupun mempercepat kemandirian PTS dari sisi ketenagaan masih belum berhasil, (b) Perbandingan kelompok bidang ilmu

eksakta dan bidang ilmu sosial masih kurang memadai, (c) kebijakan meningkatkan jumlah program studi eksakta dengan mengubah ratio program studi eksakta dengan program studi sosial, dari 30:70 menjadi 70:30 dapat berdampak menurunnya kemampuan PTS dalam meningkatkan daya tampung, (d) kebijakan untuk mengurangi fakultas yang tergolong ke dalam bidang ilmu-ilmu sosial ternyata tidak mudah, karena pada umumnya ditinjau dari segi keuangan, bidang ilmu sosial justru menopang keberadaan PTS yang bersangkutan.

2. Faktor-faktor penyebab keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kebijakan Kepmendiknas No.234/U/2000, meliputi (a) faktor sumberdaya, (b) faktor sikap pelaksana, dan (c) faktor motivasi. Dari ke tiga faktor tersebut, faktor sumberdaya masih memprihatinkan, yakni jumlah doktor hanya 594 orang (3,13%) dan Magister 4.355 orang (22,93%) dari keseluruhan jumlah dosen di Kopertis wilayah VII. Selain itu dari jumlah dosen yang ada, yang memiliki jabatan akademik Lektor ke atas hanya sebesar 3.612 orang (19,02%), sisanya sebanyak 15.381 orang (80,98%) dosen yang belum mempunyai jabatan akademik. Untuk faktor sikap pelaksana: Pimpinan PTS kurang memberi respon positif dalam memahami tujuan dari kebijakan tentang pendirian perguruan tinggi, karena masih banyak pimpinan PTS yang tidak setuju terhadap penyesuaian jumlah lulusan dengan membatasi atau mengurangi bidang ilmu sosial. Dalam hal motivasi menunjukkan bahwa pimpinan PTS lebih mengarah pada orientasi bisnis dalam mendirikan PTS.

### SARAN

Adapun saran yang diberikan adalah :

1. Kopertis Wilayah VII agar memberi batas waktu yang tegas kepada PTS-PTS untuk menyesuaikan dengan ketentuan Kepmendiknas No.234/U/2000 ini, dan menghimbau PTS yang sudah tidak layak (tidak efisien) lagi menyelenggarakan kegiatan perkuliahan untuk melakukan merger

dengan PTS lain atau memberikan rekomendasi usulan ke Dikti agar PTS tersebut menghentikan kegiatannya (ditutup).

2. Pemerintah hendaknya membuat perencanaan kebutuhan tenaga kerja masa mendatang, yang berupa informasi dan sosialisasi kebutuhan masyarakat tentang dunia kerja dan untuk pemanfaatan lulusan program-program studi langka tersebut, sehingga Perguruan Tinggi bisa menyelaraskan, dan pembukaan program studi tidak sekedar berdasarkan kelarisan belaka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J. E., 1979. *Public Policy Making*, New York; Holt, Rinehart and Winston.
- Anonim. 1990. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 0135/O/1990, tanggal 15 Maret 1990, tentang *Susunan organisasi Kopertis*.
- \_\_\_\_\_. 1993. *Kebijakan dan Strategi Pengembangan Perguruan Tinggi di Indonesia*, BKS PTIS Pusat – LMYAI, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 1999. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999, tentang *Pendidikan Tinggi*.
- \_\_\_\_\_. 1999. Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 38/Kep/MK.Waspan/8/1999, tanggal 24 Agustus 1999, tentang *Angka Kredit bagi jabatan tenaga pengajar perguruan tinggi*.
- \_\_\_\_\_. 2000. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 234/U/2000, tanggal 20 Desember 2000, tentang *Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi*.
- \_\_\_\_\_. 2001. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 108/Dikti/Kep/2001, tanggal 30 April 2001, tentang *Ijin Penyelenggaraan Program Studi*.2002.
- \_\_\_\_\_. 2002. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 004/U/2002, tanggal 17 Januari 2002, tentang *Akreditasi Program Studi Pada Perguruan Tinggi*.
- \_\_\_\_\_. 2003. Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang *Sistem pendidikan Nasional*.
- \_\_\_\_\_. 2005. Undang-undang No. 14 Tahun 2005, tentang *Undang-Undang Guru Dan Dosen*.
- Dye R. T; 1978, *Understanding Public Policy*, Englewood Cliffs, New Jersey.
- Dolbeare. K, ed; 1975, *Public Policy Evaluation*, Beverly Hills, CA: Sage Publications.
- Edward III. G; 1980, *Implementing Public Policy in Thord World*, Congressional Quarterly Press, Washington, DC.
- Faisal, S; 1990. *Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasinya*, YA3, Malang.
- Irfan, I; 1994. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta.
- Jones O. C; 1991. *Pengantar Kebijakan Publik dan Manajemen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nazir, M; 2009. *Metode Penelitian*, Cetakan Ketujuh, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor.
- Singarimbun, M dan S. Effendi; 1999. *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta.
- Soejarko S.D; 2000. *Public Policy*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Sugiyono; 1997. *Metode Penelitian Administrasi*, Edisi Kelima, Alfabeta, Bandung.
- Weiss, C. H; 1972, *Evaluation Research Methods of Assessing Program Effectiveness*, Amerika Serikat.
- Wibawa, S; 1994. *Kebijakan Publik, Proses dan Analisis*, Intermedia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- William N. D (Penyunting Muhadjir Darwin); 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua, Gajah Mada University Press.